

**DAMPAK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP
KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2015-2016**

Oleh : Tengku Kamaruzaman
Email : t.kamaruzaman@gmail.com
Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si,

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) harus di buat suatu rencana kerja yang matang serta adanya suatu mekanisme kerja yang baik agar tercapainya tujuan dari organisasi yang bersangkutan secara maksimal. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalahnya bagaimanakah dampak pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap kinerja Dinas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015-2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap kinerja Dinas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015-2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Informan penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi dan kondisi yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap kinerja Dinas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015-2016 sangat berdampak pada kinerja, dikarenakan ada beberapa dari siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum berjalan dengan baik. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengatasi hambatan-hambatan tentang sumber daya manusia yang belum memadai dan kurang maksimalnya pembantu pengurus barang bagian dalam pengelolaan barang milik daerah, yaitu dengan melakukan bimbingan teknologi tentang pengelolaan barang daerah.

Kata Kunci : Dampak Pengelolaan, Barang Milik Daerah, Kinerja

***IMPACT ON LOCAL PROPERTY MANAGEMENT PERFORMANCE
DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE IN THE DISTRICT
MERANTI ISLANDS YEAR 2015-2016***

Oleh : Tengku Kamaruzaman
Email : t.kamaruzaman@gmail.com
Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In the management of fixed assets (Regional Property) should be made a thorough work plan as well as the existence of a working mechanism in order to achieve the objectives of the organization concerned to the fullest. Problems in how the problem of research formulated Regional Property management impacts on the performance of the District Education Office in Kepulauan Meranti Year 2015-2016. The purpose of this study was to determine the effects of management on the performance of Regional Property Office of Education in Kepulauan Meranti Regency Year 2015-2016. This study used a descriptive approach with qualitative methods. This research is located in the Department of Education and Culture Meranti Islands District. The informants are people who provide information and conditions related to the research problem that staff at the Department of Education and Culture Meranti Islands District. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Data analysis using descriptive methods.

The results of this study can be concluded that the Regional Property management on the performance of the District Education Office in Kepulauan Meranti Year 2015-2016 a significant impact on performance, because there are a couple of cycles of Property Management Areas that have not been going well. Efforts Department of Education and Culture Meranti Islands regency to overcome the obstacles of human resources inadequate and poorly maximum auxiliary board items inside the asset management area, is conducting technological guidance regarding the management of local goods. Keywords: Impact Management, Regional Property, Performance

Keywords: Monitoring, Provider License Early Childhood Education

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomi, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2015-2016 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara menyebutkan bahwa Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah, dijelaskan bahwa Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuai uang dan surat berharga lainnya.

Belanja Pemerintahan Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah maupun bendahara pengeluaran yang mengurangi

ekuitas dana merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja Pemerintah Daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincin objek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. (Ritonga, 2009: 188).

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain: (1) Pengelolaan penerimaan pendapatan belum sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Kesalahan penganggaran Belanja Modal pada 3 (tiga) SKPD; (3) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pelimpahan KPP Pratama Pajak Bengkalis belum dilakukan validasi; (4) Pengelolaan dan pengamanan persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum memadai; dan (5) Persiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menuju penerapan Laporan

Kuangan Berbasis Aktual belum memadai.

Badan Pengawas Keuangan juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: (1) Pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) tidak tepat waktu; (2) Kekurangan pembayaran retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum (3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial belum didukung Laporan Pertanggungjawaban; (4) Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum tertib; (5) Kekurangan pekerjaan pemberian pada 2 (dua) Paket pembangunan drainase; dan (6) Terdapat 4 (empat) Paket Kontrak Pekerjaan Fisik sampai dengan akhir TA 2014 belum Selesai dan putus kontrak.

Barang negara atau daerah merupakan output dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemahaman ini selaras dengan prinsip produksi, yakni barang tidak hanya dipandang sebagai benda yang dibeli, tetapi juga bisa berupa produk yang dihasilkan dari proses produksi. Mulai input material, peralatan, dan sumber daya manusia (SDM) kemudian diproses sesuai dengan desain output yang telah ditetapkan.

Pengelolaan barang milik daerah (pemerintah daerah) ditentukan sebagai berikut:

1. Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

3. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinya.

Berkaitan dengan hal dimaksud, maka dikeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 1 menyebutkan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun total aset tetap (Barang Milik Daerah) berjumlah 11.719 aset tetap, dengan rincian sebanyak 10.189 atau 87,0% aset tetap (Barang Milik Daerah) berada dalam kondisi baik, dalam kondisi rusak sebanyak 1.129 atau 9,6% aset tetap (Barang Milik Daerah), dalam kondisi hilang sebanyak 392 atau 3,3% aset tetap (Barang Milik Daerah).

Dari jumlah dan kondisi aset tetap (Barang Milik Daerah) yang disajikan diatas mencerminkan dalam kondisi yang baik, namun kondisi aset tetap (Barang Milik Daerah) yang lainnya tidak boleh kita lupakan, baik yang rusak, hilang, maupun yang dalam pengerjaan. Walaupun jumlah aset tetap

(Barang Milik Daerah) yang rusak dan hilang serta yang dalam pengerjaan jauh lebih kecil, tetapi mempunyai nilai harga yang apabila dirupiahkan mempunyai nilai yang sangat besar.

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis menemukan beberapa fenomena yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan barang dan aset pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain:

Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, tahun 2014 dinilai sangat lamban. Progres hanya 0,0 persen, alasannya waktu itu PPTK nya mengundurkan diri. Selain itu, Disdik juga sempat berdalih dengan tidak adanya pembangunan fisik triwulan satu dan dua disebabkan rasionalisasi anggaran.

Pemerintah pusat terhitung mulai tahun 2014 sampai tahun 2015 ini dapat dipastikan tidak akan mengucurkan alokasi dana alokasi khusus (DAK) ke Dinas Pendidikan yang berada dibawah naungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti. Alasannya, karena instansi ini selain tidak mampu menggunakan dana DAK secara maksimal, maupun secara transparan. Ternyata alokasi dana DAK tahun sebelumnya tidak mampu meningkatkan mutu dan kualitas program di bidang tersebut.

Kurangnya sinkronisasi antara pemeriksa barang dengan penyimpan barang yang baik antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga dengan UPTD Kecamatan sebagai akibat komunikasi tidak berjalan secara baik sehingga mengakibatkan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran

(LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) tidak pernah disampaikan dan akan mempengaruhi data aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan suatu pokok permasalahan dalam penelitian ini. “Bagaimanakah pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Tampan Tahun 2015?”

B. KERANGKA TEORI

1. Manajemen Pemerintahan

Di antara beberapa ahli manajemen yang dianggap berpengaruh, ada salah satu ahli yang terkenal dengan definisinya tentang manajemen yaitu Mary Parker Follet, mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Atau sebagai pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang ada sehingga hasilnya maksimal (Nawawi, 2013:10).

Dengan mengutip dari sejumlah sumber yang cukup populer dapat dikemukakan sejumlah definisi yang dirumuskan oleh sejumlah ahli di bidang manajemen. Longenecker mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kegiatan manajer dalam mengambil keputusan, mengoordinasikan usaha-usaha kelompok, dan kepemimpinan. Lebih teknis lagi, Kast & Rosenzweig mengartikan manajemen merupakan kegiatan yang meliputi koordinasi

orang-orang dan koordinasi sumber-sumber material untuk mencapai tujuan organisasi. Semen tara itu Henry L. Sisk mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dari semua sumber (tenaga manusia, dana, material, waktu, metode kerja, dan tempat) melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian supaya dapat mencapai sasaran yang diinginkan. (Nawawi, 2013:11).

Ermaya Suradinata mendefinisikan manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses pergerakan untuk mencapai tujuan negara, di mana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepamongprajaan. Sementara itu, Sondang P. Siagian mendefinisikan manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah. (Nawawi, 2013:21).

2. Manajemen Aset

Pengelolaan barang atau manajemen aset merupakan bahagian yang tidak bisa dipisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi duatu pembangunan daerah yaitu berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca

tahunan, serta dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan (LAN. 2007).

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus melakukan perubahan mendasar dalam mengelola daerahnya. Pemerintah daerah harus mampu mengenali kompetensi (*Core Competences*), khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan investasi daerah. Hal ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengubah secara signifikan paradigma pengelolaan kabupaten. Mengacu pada perubahan yang terjadi tersebut tentu diperlukan adanya upaya nyata yang sistematis dan menyeluruh dalam pengelolaan aset daerah pada masa mendatang.

Saat ini dalam properti berkembang teori baru tentang manajemen aset yang dikemukakan oleh Briton, Conellan, Croft, yang menyatakan bahwa "*Define good asset menegement in terms of measuring the value of properties (assets) in monetary terms and employing the minimum of expenditure on its management* (Doli, 2010). Manajemen aset itu sendiri telah berkembang menjadi dinamis, inisiatif dan strategis.

3. Kinerja

Wibowo (2012:7) mengatakan kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk gaimana proses pekerjaan berlangsung.

Armstrong dan Baron (1998) dalam Wibowo (2012;7) mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan

tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Informan penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi dan kondisi yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif.

D. HASIL PENELITIAN

1. Dampak Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap kinerja Dinas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015-2016

1. Perencanaan

Setelah diajukan rencana kebutuhan barang, selanjutnya Sekretaris Daerah bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah membahas usulan tersebut dengan memperhatikan data barang yang ada untuk ditetapkan sebagai

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Drs. M. Arif, M.Pd.I selaku Kepala Dinas, beliau menambahkan bahwa:

“Rencana kebutuhan barang sebenarnya harus berdasarkan dengan jumlah barang yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada, misalnya saja ada barang yang rusak atau hilang, itu harus segera diajukan rencana kebutuhan barang, Kemudian hal lain yang menyebabkan tidak terlaksananya perencanaan kebutuhan dan penganggaran secara optimal ialah karena lambannya serta tidak terlaksananya proses penghapusan barang pada unit pemakai secara tepat, sesuai kondisi barang tersebut.”

(Wawancara dengan Drs. M. Arif, M.Pd.I, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 18 November 2016).

Selanjutnya Ibu Hj. Fitria Ningsih, SE selaku Kasubbag Keuangan, beliau menambahkan bahwa:

“Perencanaan pengelolaan barang itu

sesuai dengan kebutuhan barang, Kita melakukan pendataan dengan sistem penomoran sesuai dengan jenis barangnya. Istilahnya dengan pemberian label”

(Wawancara dengan Hj. Fitria Ningsih, SE selaku Kasubbag Keuangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 18 November 2016).

Selanjutnya Bapak Armansyah, S.Pd, beliau menambahkan bahwa :

“Rencana kebutuhan barang dibuat oleh masing-masing pembantu pengurus barang bagian berdasarkan jumlah pegawai dan berdasarkan kebutuhan barang di bagian masing-masing dan pengurus barang sekretariat kemudian merekapitulasi seluruh rencana kebutuhan barang, walaupun dalam realisasi tidak sesuai dengan perencanaan itu bisa saja terjadi karena beberapa faktor seperti adanya kebijakan dari Tim Anggaran dan Bappeda Serta DPRD karena anggaran sebelum di setujui pasti melalui pembahasan dengan 3 instansi tersebut, pada dasarnya kita sudah

mengajukan sesuai dengan kebutuhan.”

(Wawancara dengan Armansyah, S.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 17 November 2016).

Berdasarkan keterangan di atas dan pengamatan peneliti pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran seperti yang dijelaskan di atas memiliki kelemahan dimana para pengurus barang dan pembantu pengurus barang telah membuat rencana kebutuhan sesuai dengan kebutuhan cuma dalam kenyataan yang direalisasikan justru jauh dari rencana kebutuhan, hal itu disebabkan karena adanya beberapa proses dalam pengesahan anggaran yaitu melalui proses verifikasi dan pembahasan dengan beberapa instansi seperti Tim Anggaran, Bappeda, dan DPRD sehingga bisa saja dalam pembahsan tersebut ada rencana kebutuhan yang dikurangi atau bahkan dihapus dari jumlah yang di usulkan karena ada kebijakan dari daerah untuk memfokuskan ke kegiatan tertentu atau adanya pengurangan anggaran atau bahkan hal lain. Jadi terkadang perencanaan sesuai kebutuhan belum bisa sepenuhnya kita terapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2014.

2. Pengadaan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Bapak Husni Mubarak, S.Ag, M.Ag beliau mengatakan bahwa :

“Setiap barang yang dapat itu kan dalam rencana kerja setelah kita usulkan, nanti keluar DPA (Daftar Pengajuan Asset), dari DPA itulah kita tahu bahwa dapat atau tidak, misal pengadaan komputer 10 unit. Kalau untuk kegiatan untuk 200 juta dilakukan pelelangan, tapi kalau 200 juta ke bawah dilakukan penunjukkan langsung. Kalau barang itu sudah dikerjakan, sudah dapat untuk kantor ini ada bukti serah terimanya ke Dinas, setelah barang itu dapat dimasukkan ke dalam aset daerah. ”

(Wawancara dengan Husni Mubarak, S.Ag, M.Ag, Kasubbag Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 18 November 2016).

Selanjutnya Ibu Hj. Fitria Ningsih, SE selaku Kasubbag Keuangan, beliau menambahkan bahwa:

“Kita melakukan pendataan dengan menggunakan sistem penomoran, sesuai dengan jenis barangnya. Istimahnya dengan pemberian label”

(Wawancara dengan Hj. Fitria Ningsih, SE selaku Kasubbag Keuangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 18 November 2016).

Berdasarkan paparan di atas, pengadaan barang milik daerah pada kantor ini sudah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 dan telah terlaksana dengan baik, yaitu dibentuknya panitia pengadaan barang dan panitia penerima pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Pemeliharaan

Dalam ketentuan yang ada, pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah harus menyelenggarakan perawatan barang secara ringan yang dilakukan setiap hari, perawatan barang secara berkala yang melibatkan tenaga teknisi seperti melakukan service rutin barang dan kemudian melaksanakan perawatan secara berat melibatkan tenaga ahli terhadap barang yang berada dalam keadaan rusak parah.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Fitria Ningsih, SE selaku Kasubbag Keuangan, beliau mengatakan bahwa:

“Pemeliharaan dan perawatan itu dipelihara oleh bidang masing-masing. Dengan adanya pengelolaan barang yang lebih baik maka pegawai akan termotivasi untuk melaksanakan kerja dan

melaksanakan pelayanan, sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih akurat agar terjadinya kerjasama antara pegawai. Sehingga terciptalah prestasi dalam bekerja.”

(Wawancara dengan Hj. Fitria Ningsih, SE selaku Kasubbag Keuangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 18 November 2016).

Bapak Husni Mubarak, S.Ag, M.Ag, beliau menambahkan bahwa:

“Kalau untuk pemeliharaan, contoh kita mungkin untuk pengadaan motor dinas roda dua, untuk pemeliharaannya itu ada biaya sendiri ada biaya dari SKPD Dinas.kalau biaya dinas mungkin perpanjang STNK ditanggung oleh dinas, itupun kalau biayanya diusulkan dananya ke rencana kerja, kalau tidak diusulkan biayanya ditanggung masing-masing pribadi. Kalau kita sendiri yang memakai, maka kita sendiri yang memeliharanya. Begitu juga dengan pemeliharaan elektronik, kalau diusulkan dapat biaya pemeliharaan,

kalau tidak ditanggung oleh masing-masing bagian.”

(Wawancara dengan Husni Mubarak, S.Ag, M.Ag, Kasubbag Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 17 November 2016).

Selanjutnya wawancara dengan bapak Syafrizal Ahmadi, S.Pd, selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti tentang bagaimana pemeliharaan terhadap barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pemeliharaan barang milik daerah dilakukan secara rutin terutama untuk kendaraan dinas roda empat, kecuali roda dua yang pemeliharaan di bebaskan kepada pemakai, untuk perawatan dan pemeliharaan gedung biasanya kita usulkan untuk proses rehab baru di laksanakan pemeliharaan kemudian untuk peralatan kantor seperti komputer, printer dan lain-lain juga ada service secara berkala dari teknisi komputer.”

(Wawancara dengan Syafrizal Ahmadi, S.Pd, selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 17 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengamanan dan pemeliharaan pada Dinas Pendidikan masih belum berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2014, dimana masih ada kendaraan yang STNK nya hilang tapi tidak di urus duplikatnya sehingga secara otomatis pajak tidak bisa dibayarkan.

4. Pengawasan dan Pengendalian

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Fitria Ningsih, SE selaku Kasubbag Keuangan, beliau mengatakan bahwa:

“Pengendalian barang yang ada di Dinas Pendidikan dikendalikan oleh bidang masing-masing dan tim pengadaan barang.”

(Wawancara dengan Hj. Fitria Ningsih, SE selaku Kasubbag Keuangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 18 November 2016).

Jadi, pengawasan, pengendalian dan pembinaan dapat

terorganisasi dengan baik, dapat saling bekerja sama antara atasan dan bawahannya dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian kegiatan pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat mencegah serta mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat tercapainya tujuan dari kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien.

5. Pembiayaan

Wawancara peneliti dengan Ibu Hj. Fitria Ningsih, SE selaku Kasubbag Keuangan tentang kegiatan pembiayaan barang milik daerah beliau mengatakan bahwa:

“Dari segi pembiayaan bisa dikatakan sudah memadai, seperti pengurus barang diberikan tunjangan yang sesuai dengan beban tugas yang dilaksanakan, dan kiranya besarnya tunjangan sudah mencukupi. Kemudian besarnya pembiayaan untuk melakukan kegiatan pemeliharaan, pembukuan, pembelian blanko, dan yang lainnya memang tidak terlalu besar tapi kiranya sudah mencukupi. Pembiayaan yang dilakukan memang harus disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan. Jadi, kegiatan

pembiayaan secara umum sudah berjalan dengan ketentuan yang ada.”

(Wawancara dengan Hj. Fitria Nengsih, SE selaku Kasubbab Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 18 November 2016).

Kutipan wawancara peneliti dengan bapak Syafrizal Ahmadi, S.Pd Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti tentang kegiatan pembiayaan barang milik daerah beliau mengatakan bahwa:

“Dari segi pembiayaan memang pengurus barang, penyimpan barang, pembantu pengurus barang bagian, pembantu penyimpan memang sudah diberikan insentif sesuai dengan besar anggaran dikelola, namun untuk biaya operasional teknis untuk kegiatan di lapangan seperti survei, inventarisasi, cek fisik dan lain-lain tidak dibiayakan jadi kita masih kesulitan untuk bekerja maksimal karena keterbatasan penganggaran itu.”

(Wawancara dengan Syafrizal Ahmadi, S.Pd, selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 17 November 2016).

Dari hasil keterangan wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembiayaan untuk insentif pengurus barang, penyimpan barang, pembantu pengurus barang bagian, pembantu penyimpan sudah di anggarkan, namun untuk biaya operasional dilapangan masih belum di anggarkan sehingga menimbulkan kesulitan bagi para pengurus barang, penyimpan barang, pembantu pengurus barang bagian, pembantu penyimpan untuk maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya.

B. Upaya-upaya dalam Mengatasi Dampak Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengatasi hambatan-hambatan tentang sumber daya manusia yang belum memadai dan kurang maksimalnya pembantu pengurus barang bagian dalam pengelolaan barang milik daerah, yaitu dengan melakukan bimtek tentang pengelolaan barang kepada pembantu pengurus barang serta dengan tidak memberikan pekerjaan pada

bagian terlalu banyak kepada pembantu pengurus barang bagian supaya mereka bisa fokus membuat laporan secara berkala kepada pengurus barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Melibatkan para pimpinan untuk ikut dalam bimtek tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga dalam membuat kebijakan mereka bisa taat kepada aturan yang ada.
3. Mangajukan usulan untuk pengadaan sarana-prasarana pendukung untuk pengelolaan barang milik daerah.
4. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan barang milik daerah, dengan tujuan semua pihak yang terkait dalam barang milik daerah tersebut bisa memahami tata cara pengelolaan aset tetap yang baik
5. Membuat aturan yang tegas mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar aturan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan penelitian yang telah dilakukan terhadap Dampak pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap kinerja Dinas Pendidikan di

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015-2016. Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini tentang pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap kinerja Dinas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015-2016 sangat berdampak pada kinerja, dikarenakan ada beberapa dari siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum berjalan dengan baik.

F. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dampak pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap kinerja Dinas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015-2016, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengatasi hambatan-hambatan tentang sumber daya manusia yang belum memadai dan kurang maksimalnya pembantu pengurus barang bagian dalam pengelolaan barang milik daerah, yaitu dengan melakukan bimbingan teknologi tentang pengelolaan barang kepada pembantu pengurus barang serta dengan tidak memberikan pekerjaan pada bagian terlalu banyak kepada pembantu pengurus barang bagian supaya mereka bisa fokus membuat laporan secara berkala kepada pengurus barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Melibatkan para pimpinan untuk ikut dalam bimbingan teknologi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga dalam membuat

- kebijakan pimpinan bisa taat kepada aturan yang ada.
3. Mangajukan usulan untuk pengadaan sarana-prasarana pendukung untuk pengelolaan barang milik daerah.
 4. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan barang milik daerah, dengan tujuan semua pihak yang terkait dalam barang milik daerah tersebut bisa memahami tata cara pengelolaan aset tetap yang baik
 5. Membuat aturan yang tegas mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar aturan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, C.S.T.dan Kansil, Christine S.T. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Alfabeta.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2014
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Cetakan Kelima. Bandung: Alfabeta.
- Pramusinto, Agus. 2014. *Mozaik Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Institute of Governance and Public Affairs.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2009. *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah